



# Sinergikan Program Pembangunan Prioritas

**NGABANG** - Pj Bupati Landak Samuel, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Ngabang 2023 dan penyusunan RKPD kabupaten Landak tahun 2024 di Aula Kantor Camat Ngabang, Rabu (1/2). Samuel menyampaikan, bahwa ini merupakan acara tahunan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Kabupaten Landak 2024 memiliki tema mewujudkan masyarakat landak yg maju dan mandiri melalui percepatan penyediaan infrastruktur dasar.

"Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pada tingkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota paling tidak memiliki tiga buah dokumen perencanaan, baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana



**MUSRENBANG: Pj Bupati Landak Samuel membuka Musrenbang Ngabang di Aula Kantor Camat Ngabang, Rabu (1/2).**

Pembangunan jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan RKPD yang memuat rencana kerja tahunan," papar Samuel di Ngabang.

Lebih lanjut, Samuel mengatakan bahwa dalam proses penyusunan RKPD ini daerah perlu menyelenggarakan musrenbang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi hingga

tingkat nasional. "RKPD Kabupaten Landak Tahun 2024 yang disusun melalui proses musrenbang ini nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024," ucap Samuel.

Ia berharap bahwa rumusan yang dibawa pada forum ini merupakan aspirasi masyarakat dan usulan yang

akan dibahas pada forum ini hendaknya merupakan usulan yang benar-benar prioritas, sehingga Musrenbang ini tidak hanya bersifat seremonial belaka.

"Saya juga berharap usulan ini akan ditelaah lebih lanjut oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait dan diharapkan juga menjadi bahan referensi bagi anggota DPRD Kabupaten

Landak dalam menjangkau aspirasi masyarakat agar se-laras dengan usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD," harapnya.

Samuel menyatakan bahwa aspirasi atau keinginan-keinginan masyarakat yang kita himpun dan akan kita diskusikan perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah maupun negara.

"Sumber pembiayaan kabupaten kita masih bertumpu pada dana alokasi pemerintah pusat baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan (TP), Dana Dekonsentrasi, dan dana-dana dari pemerintah pusat lainnya, serta masih sangat sedikit yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang seharusnya menjadi komponen utama sumber pembiayaan bagi daerah dalam era otonomi ini," ujar Samuel. (mif)